

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
TAHUN 2015**



KEMENTERIAN PERTANIAN

2014


KATA PENGANTAR

INPRES Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah untuk melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Instansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi. Salah satu kegiatan yang harus dilakukan adalah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Tahun 2015 merupakan tahun transisi, yang merupakan kelanjutan dari Renstra Kementerian Pertanian 2010-2014 dan tahun pertama dari pengimplementasian Renstra Kementerian Pertanian 2015-2019. Sesuai rancangan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2015 dan rancangan Renstra Kementerian Pertanian 2015-2019, Sasaran Strategis yang ingin dicapai oleh Kementerian Pertanian pada tahun 2015 adalah: (1) Meningkatnya ketahanan pangan dengan penyediaan bahan pangan pokok; (2) Meningkatnya kualitas, nilai tambah, daya saing, ekspor produk pertanian dan substitusi impor; (3) Meningkatnya ketersediaan bahan baku bio-industri dan bio-energi; serta (4) Meningkatnya penyediaan infrastruktur petani.

RKT Kementerian Pertanian Tahun 2015 merupakan dokumen transisi yang menjembatani antara Rencana Kerja Kementerian Pertanian Tahun 2015 dengan rancangan dokumen Renstra Kementerian Pertanian 2015-2019. Dengan disusunnya RKT Tahun 2015 diharapkan dapat dijadikan acuan dalam penyusunan Penetapan Kinerja Tahun 2015 dan sebagai dasar pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Pertanian guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan pertanian pada tahun 2015.

Jakarta, 10 Juni 2014
Menteri Pertanian,



Suswono

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	2
1.3. Sasaran	3
1.4. Dasar Hukum	3
BAB II ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN 2015	4
2.1. Visi dan Misi Kementerian Pertanian 2015-2019.....	4
2.2. Tujuan dan Sasaran Kementerian Pertanian 2015-2019	4
2.3. Strategi Pembangunan Pertanian 2015	5
2.4. Kebijakan Pembangunan Pertanian 2015	5
BAB III PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN 2015	7
3.1. Program dan Penjabaran Program Pembangunan Pertanian Tahun 2015	7
3.2. Cara Melaksanakan Kegiatan	14
3.3. Indikator Kinerja Utama (IKU)	15
BAB IV PENUTUP	17
FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN	18

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Isu strategis yang kini sedang dihadapi dunia adalah perubahan iklim global, krisis pangan dan energi dunia, harga pangan dan energi meningkat, sehingga negara-negara yang semula menjadi pengekspor pangan cenderung menahan produknya dijadikan stok pangan. Kondisi global tersebut juga terjadi di Indonesia, sehingga diperlukan upaya-upaya guna mengamankan produksi dan meningkatkan stok pangan nasional. Isu strategis nasional lainnya adalah mengenai laju pertumbuhan penduduk yang masih tinggi, tingginya laju konversi lahan, terbatasnya infrastruktur pertanian serta pola pangan penduduk yang bergantung pada beras.

Pada tahun 2015 pertanian di Indonesia masih dihadapkan pada tantangan berat antara lain: (1) dampak perubahan iklim pada sektor pertanian yang berdampak pada menurunnya produktivitas dan menurunnya kualitas hasil panen, (2) meningkatnya harga pangan yang berkorelasi pada tingkat inflasi dan tingkat kemiskinan, (3) ketersediaan produksi kedelai, gula dan daging dalam negeri dan internasional terbatas, di sisi lain kebutuhan konsumsi domestik untuk ketiga komoditas tersebut meningkat, (4) kenaikan impor bahan pangan dan pakan yang tentunya akan mengurangi devisa negara, (5) terbatasnya pembiayaan pertanian yang mudah diakses petani/peternak, (6) terbatasnya infrastruktur lahan dan air, (7) sistem penyuluhan pertanian yang belum efektif, dan (8) belum optimalnya peran dan dukungan pemerintah daerah.

Dari sisi pembangunan ekonomi nasional, bukti empiris menunjukkan bahwa sektor pertanian memiliki peran penting terhadap ekonomi nasional, yang dapat dilihat dari kontribusi terhadap produk domestik bruto, penyerap tenaga kerja, neraca perdagangan, penyedia bahan pangan, bahan energi, pakan dan bahan baku industri, serta sumber pendapatan masyarakat di perdesaan. Besarnya peran dalam perekonomian nasional tersebut ternyata belum dapat dinikmati secara proporsional oleh para pelaku usaha pertanian secara memadai.

Terkait dengan manajemen pembangunan nasional, dalam era reformasi dan otonomi daerah, pemerintah terus melakukan perubahan sesuai perkembangan jaman, antara lain berupa reformasi manajemen keuangan negara, reformasi birokrasi maupun reformasi dalam sistem perencanaan dan penganggaran. Kementerian Pertanian telah menindaklanjuti berbagai reformasi tersebut serta mengakomodasi perubahan yang terjadi, mengimplementasi program dan kegiatan di lapangan, guna memenuhi tuntutan peningkatan kinerja dalam mewujudkan hasil pembangunan sesuai dengan rencana yang strategis.

Dalam rangka membangun ekonomi wilayah, terlihat bahwa peran sektor pertanian sangat strategis dan memiliki kaitan kuat di hulu maupun hilir. Peran strategis tersebut perlu dioptimalkan sejalan dengan strategi pemerintah membangun enam Koridor Pengembangan Ekonomi Indonesia (KPEI). Peran strategis sektor pertanian tentunya harus dipahami bersama-sama sehingga mampu mendorong partisipasi masyarakat dan swasta. Dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dan swasta, kendala yang dihadapi antara lain pemberdayaan masyarakat tidak saja memerlukan pendekatan teknis seperti yang telah diterapkan selama ini, tetapi juga pendekatan sosial budaya yang mampu merangsang perubahan sikap dan pola kerja, melalui pemilihan kegiatan yang mampu memicu pembangunan pertanian secara optimal.

Selanjutnya berkaitan dengan aspek pengelolaan kinerja instansi, telah dibangun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya pelaksana kebijakan dan program berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Di dalam SAKIP terdapat komponen-komponen yang harus dipenuhi antara lain: proses penyusunan rencana strategis, penyusunan rencana kinerja, penetapan kinerja, pengukuran dan pelaporan kinerja.

Dalam SAKIP, dokumen perencanaan yang harus diwujudkan secara terintegrasi adalah rencana strategis, rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja. Renstra memberikan arah pembangunan organisasi jangka menengah, sedangkan rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja merupakan target dan komitmen kinerja yang akan diwujudkan pada suatu tahun tertentu. Rencana kinerja tahunan merupakan penjabaran dari renstra, memuat seluruh rencana atau target kinerja yang hendak dicapai dalam satu tahun yang dituangkan dalam sejumlah indikator kinerja strategis yang relevan. Selanjutnya, rencana kerja disusun sesuai dengan ketersediaan alokasi anggaran, yang dituangkan dalam suatu penetapan kinerja. Penetapan kinerja akan dipertanggungjawabkan capaian kerjanya dalam LAKIP.

Dalam rangka perencanaan kinerja pembangunan pertanian pada TA. 2015, maka disusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kementerian Pertanian Tahun 2015.

1.2. Maksud dan Tujuan

RKT Kementerian Pertanian Tahun 2015 dimaksudkan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis dan acuan dalam penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaksanaan kinerja pembangunan pertanian. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai adalah:

- a. Menyusun RKT Kementerian Pertanian Tahun 2015;

- b. Menyediakan arahan penyusunan Penetapan Kinerja (PK) Kementerian Pertanian Tahun 2015;
- c. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas, ketertiban, transparansi serta akuntabilitas kinerja Kementerian Pertanian.

1.3. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dari RKT Kementerian Pertanian tahun 2015 adalah:

- a. Tersusunnya RKT Kementerian Pertanian Tahun 2015 secara baik dan terukur;
- b. Tersedianya arahan penyusunan PK Kementerian Pertanian Tahun 2015;
- c. Meningkatnya efisiensi, efektivitas, ketertiban, transparansi serta akuntabilitas kinerja Kementerian Pertanian.

1.4. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan RKT Kementerian Pertanian Tahun 2015 adalah:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- d. Surat Keputusan Kepala LAN Nomor 239 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
- f. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- g. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- h. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

BAB II

ARAH DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN 2015

2.1. VISI dan MISI Kementerian Pertanian 2015-2019

VISI Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019 adalah “Terwujudnya sistem pertanian bio-industri berkelanjutan yang menghasilkan beragam pangan sehat dan produk bernilai tambah tinggi berbasis sumberdaya lokal untuk kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani”.

Sedangkan Misi Kementerian Pertanian yang diemban pada tahun 2015-2019 adalah:

- a. Mewujudkan kedaulatan pangan melalui peningkatan produksi, produktivitas dan mutu pangan yang beragam dan sehat;
- b. Mewujudkan sistem pertanian bio-industri berkelanjutan;
- c. Meningkatkan nilai tambah, daya saing, ekspor, dan substitusi impor produk pertanian;
- d. Mewujudkan usaha pertanian terintegrasi untuk menumbuhkan usaha ekonomi produktif dan menciptakan lapangan kerja di perdesaan;
- e. Meningkatkan sistem usaha tani berkelanjutan melalui adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta perlindungan, pelestarian, pemanfaatan, dan pengembangan sumberdaya genetik;
- f. Meningkatkan kapasitas sumberdaya pertanian untuk pengembangan kawasan pertanian bio-industri;
- g. Mendorong terwujudnya sistem kemitraan usaha dan perdagangan komoditas pertanian yang sehat, jujur, dan berkeadilan; dan
- h. Meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan aparatur pemerintah bidang pertanian yang amanah dan profesional.

2.2. Tujuan dan Sasaran Kementerian Pertanian 2015-2019

Tujuan yang ingin dicapai Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019:

- a. Meningkatkan produksi, produktivitas, dan mutu produk pertanian;
- b. Mewujudkan sistem pertanian bio-industri berkelanjutan yang berbasis sumberdaya lokal;
- c. Menumbuhkembangkan diversifikasi pangan dan peningkatan gizi;
- d. Meningkatkan nilai tambah, daya saing, ekspor dan substitusi impor produk pertanian; dan

- e. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.

Selama lima tahun ke depan, dalam membangun pertanian di Indonesia, sasaran strategis yang ingin dicapai, yaitu:

- a. Peningkatan ketahanan pangan;
- b. Peningkatan nilai tambah, daya saing, ekspor, dan substitusi impor;
- c. Penyediaan dan peningkatan bahan baku bio-industri dan bio-energi; dan
- d. Peningkatan kesejahteraan petani.

2.3. Strategi Pembangunan Pertanian 2015-2019

Guna mencapai visi dan menjalankan misi pembangunan pertanian, strategi yang ditempuh Kementerian Pertanian selama periode 2015-2019 adalah:

- a. Peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan lahan;
- b. Peningkatan infrastruktur dan sarana pertanian;
- c. Pengembangan dan perluasan logistik benih/bibit;
- d. Penguatan kelembagaan petani;
- e. Penguatan dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pertanian;
- f. Pengembangan dan penguatan bio-industri dan bio-energi;
- g. Pengembangan dan penguatan pembiayaan pertanian; dan
- h. Peningkatan dukungan inovasi dan teknologi.

2.4. Kebijakan Pembangunan Pertanian 2015-2019

Kebijakan pembangunan pertanian 2015-2019 dirancang sebagai bagian dari keberlanjutan Renstra Kementerian Pertanian 2010-2014 dan merupakan tahapan implementasi dari Strategi Induk Pembangunan Pertanian (SIPP) 2015-2045. Kebijakan pembangunan pertanian 2015-2019 terdiri dari kebijakan umum dan kebijakan teknis operasional.

Kebijakan Umum Pembangunan Pertanian 2015-2019 terdiri dari:

- a. Kebijakan peningkatan swasembada beras dan peningkatan produksi jagung, kedelai, gula, daging, cabai, dan bawang merah;
- b. Kebijakan pengembangan produk berdaya saing, ekspor, substitusi impor, serta bahan baku bio-industri;
- c. Kebijakan penguatan sistem dan kelembagaan perbenihan/pembibitan, petani, teknologi, penyuluhan, perkarantina dan ketahanan pangan;
- d. Kebijakan pengembangan kawasan pertanian;

- e. Kebijakan fokus komoditas strategis;
- f. Kebijakan pengembangan sarana, infrastruktur dan agroindustri di perdesaan; dan
- g. Kebijakan tata kelola pemerintahan yang baik dan reformasi birokrasi.

Sedangkan Kebijakan Teknis Operasional Pembangunan Pertanian 2015-2019 terdiri dari:

- a. Kebijakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, penanganan pasca bencana alam serta perlindungan tanaman;
- b. Kebijakan re-orientasi multi produk pertanian;
- c. Kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan subsidi dan kredit pembiayaan usaha pertanian;
- d. Kebijakan pengelolaan program tematik mendukung pembangunan pertanian; dan
- e. Kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati.

BAB III

PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN 2015

3.1. Program dan Penjabaran Program Pembangunan Pertanian Tahun 2015

Program utama pembangunan pertanian merupakan kumpulan dari kegiatan-kegiatan yang dirancang untuk mencapai sasaran tertentu atau beberapa sasaran sekaligus. Program tersebut adalah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional. Hal ini dalam rangka harmonisasi/keselarasan mulai dari RPJMN, Renstra, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Penetapan Kinerja (PK).

Beberapa pengertian yang terkait dengan RKT, adalah: (1) sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang spesifik dan terukur. Sasaran harus sesuai dengan uraian yang ada dalam dokumen Renstra atau RKT dari instansi pemerintah yang bersangkutan, (2) indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan, berupa *output*/keluaran maupun *outcome*/hasil, (3) indikator kinerja *output*/keluaran adalah sesuatu berupa produk/jasa yang terukur sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan, dan (4) Indikator *outcome*/hasil adalah keluaran yang mencerminkan berfungsinya kegiatan pada jangka menengah.

Sesuai amanat reformasi perencanaan dan penganggaran, disebutkan bahwa program merupakan tanggung jawab unit Eselon-I dan dalam bentuk kegiatan yang menjadi tanggung jawab unit kerja di lingkupnya. Program menghasilkan *outcome*. Sedangkan kegiatan menghasilkan output yang mendukung pencapaian *outcome* program.

Kementerian Pertanian pada tahun 2015 melaksanakan 12 Program Pembangunan Pertanian. Masing-masing program pembangunan pertanian tersebut mencerminkan tugas dan fungsi dari 12 unit Eselon-I lingkup Kementerian Pertanian. Ukuran keberhasilan Eselon-I dalam menjalankan program tersebut diukur kinerjanya dalam bentuk *outcome*. Sebagaimana diketahui bahwa *outcome* merupakan hasil dari *output* kegiatan yang dilaksanakan oleh unit kerja di bawahnya (eselon-II). Adapun 12 Program Pembangunan Pertanian Tahun 2015 disajikan pada Tabel 3-1.

Tabel 3-1. Program Pembangunan Kementerian Pertanian Tahun 2015

No.	Nama Program
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertanian
2	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian
3	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Produksi Tanaman Pangan
4	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Hasil Hortikultura Ramah Lingkungan
5	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hasil Perkebunan Berkelanjutan
6	Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat
7	Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu, Pemasaran Hasil dan Investasi Pertanian
8	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian
9	Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-Industri Berkelanjutan
10	Program Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan, dan Pelatihan Pertanian
11	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
12	Program Peningkatan Kualitas Perkarantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati

Program pembangunan pertanian dijabarkan ke dalam kegiatan-kegiatan. Masing-masing kegiatan dilaksanakan oleh unit kerja Eselon-II sesuai dengan tugas dan fungsi. Kinerja keberhasilan unit kerja Eselon-II dan unit kerja mandiri dalam melaksanakan kegiatan diukur dalam bentuk *output*. Penjabaran 12 program ke dalam 80 kegiatan secara rinci disajikan pada Tabel 3-2.

Tabel 3-2. Rancangan Program dan Kegiatan Pertanian Tahun 2015

No.	Program/Kegiatan
1.	<p data-bbox="284 454 1318 495">Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya</p> <p data-bbox="284 533 1286 573">1.1 Kegiatan Pembinaan Hukum dan Pengelolaan Informasi Publik</p> <p data-bbox="284 611 1409 685">1.2 Kegiatan Pengembangan Kerjasama Luar Negeri untuk Bidang Pangan dan Pertanian dalam Kerangka Bilateral, Regional, dan Multilateral</p> <p data-bbox="284 723 1302 797">1.3 Kegiatan Pengelolaan Keuangan, Perlengkapan, dan Kearsipan Kementerian Pertanian</p> <p data-bbox="284 835 1361 909">1.4 Kegiatan Peningkatan Kualitas Kelembagaan, Ketatalaksanaan, dan Kepegawaian</p> <p data-bbox="284 947 1302 1021">1.5 Kegiatan Koordinasi dan Pembinaan Perencanaan Kementerian Pertanian</p> <p data-bbox="284 1059 1414 1099">1.6 Kegiatan Pengembangan Perstatistikan dan Sistem Informasi Pertanian</p> <p data-bbox="284 1137 1398 1256">1.7 Kegiatan Penyelenggaraan Ketatausahaan Kementerian Pertanian, Kerumahtanggaan, dan Pelaksanaan Hubungan Masyarakat di Bidang Pertanian</p> <p data-bbox="284 1294 1334 1335">1.8 Kegiatan Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian</p>
2.	<p data-bbox="284 1386 1370 1460">Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian</p> <p data-bbox="284 1498 1406 1617">2.1 Kegiatan Peningkatan Pelaksanaan Pengawasan pada Satker Lingkup Setjen, Ditjen Hortikultura, dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian</p> <p data-bbox="284 1655 1406 1774">2.2 Kegiatan Peningkatan Pelaksanaan Pengawasan pada Satker Lingkup Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, serta Badan Ketahanan Pangan</p> <p data-bbox="284 1812 1398 1886">2.3 Kegiatan Peningkatan Pelaksanaan Pengawasan pada Satker Lingkup Ditjen Perkebunan, Ditjen P2HP, dan Badan Litbang Pertanian</p> <p data-bbox="284 1924 1398 2020">2.4 Kegiatan Peningkatan Pelaksanaan Pengawasan pada Satker Lingkup Inspektorat Jenderal, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Badan</p>

No.	Program/Kegiatan	
		Karantina Pertanian
	2.5	Kegiatan Peningkatan Pelaksanaan Pengawasan Tujuan Tertentu pada Satker Lingkup Kementerian Pertanian
	2.6	Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Inspektorat Jenderal
3.	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Produksi Tanaman Pangan	
	3.1	Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia
	3.2	Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi
	3.3	Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan
	3.4	Kegiatan Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT dan DPI
	3.5	Kegiatan Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan
	3.6	Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan
	3.7	Kegiatan Pengembangan Metode Pengujian Mutu Benih dan Penerapan Sistem Mutu Laboratorium Pengujian Benih
	3.8	Kegiatan Pengembangan Peramalan Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan
4.	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Hasil Hortikultura Ramah Lingkungan	
	4.1	Kegiatan Peningkatan Produksi dan Produktivitas Produk Buah Ramah Lingkungan
	4.2	Kegiatan Peningkatan Produksi dan Produktivitas Produk Florikultura Ramah Lingkungan
	4.3	Kegiatan Peningkatan Produksi dan Produktivitas Produk Sayuran dan Tanaman Obat Ramah Lingkungan
	4.4	Kegiatan Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura

No.	Program/Kegiatan	
	4.5	Kegiatan Pengembangan Sistem Perlindungan Tanaman Hortikultura Ramah Lingkungan
	4.6	Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura
5.	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hasil Perkebunan Berkelanjutan	
	5.1	Kegiatan Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Rempah dan Penyegar
	5.2	Kegiatan Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Semusim
	5.3	Kegiatan Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Tahunan
	5.4	Kegiatan Dukungan Penanganan Pasca Panen dan Pembinaan Usaha
	5.5	Kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan
	5.6	Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan
	5.7	Kegiatan Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih Serta Penyiapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan
6.	Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat	
	6.1	Kegiatan Peningkatan Produksi Ternak
	6.2	Kegiatan Peningkatan Produksi Pakan Ternak
	6.3	Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis dan Penyakit Zoonosis
	6.4	Kegiatan Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Benih dan Bibit
	6.5	Kegiatan Penjaminan Produk Hewan yang ASUH dan Berdaya Saing
	6.6	Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan
7.	Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu, Pemasaran Hasil dan Investasi Pertanian	

No.	Program/Kegiatan	
	7.1	Kegiatan Pengembangan Mutu dan Standardisasi
	7.2	Kegiatan Pengembangan Pemasaran Domestik
	7.3	Kegiatan Pengembangan Pemasaran Internasional
	7.4	Kegiatan Pengembangan Usaha dan Investasi
	7.5	Kegiatan Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian
	7.6	Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian
8.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	
	8.1	Kegiatan Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian
	8.2	Kegiatan Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian
	8.3	Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian
	8.4	Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian
	8.5	Kegiatan Fasilitasi Pupuk dan Pestisida
	8.6	Kegiatan Pelayanan Pembiayaan Pertanian dan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)
9.	Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-Industri Berkelanjutan	
	9.1	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian
	9.2	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen Pertanian
	9.3	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian
	9.4	Kegiatan Pengkajian dan Percepatan Diseminasi Inovasi Teknologi Pertanian
	9.5	Kegiatan Penelitian/Perekayasaan dan Pengembangan Mekanisasi Pertanian

No.	Program/Kegiatan	
	9.6	Kegiatan Penelitian/Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
	9.7	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tanaman Hortikultura
	9.8	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tanaman Perkebunan
	9.9	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Peternakan
	9.10	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan
	9.11	Kegiatan Pengembangan Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian
	9.12	Kegiatan Dukungan Manajemen, Fasilitasi dan Instrumen Teknis dalam Pelaksanaan Kegiatan Litbang Pertanian
10.	Program Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan, dan Pelatihan Pertanian	
	10.1	Kegiatan Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian
	10.2	Kegiatan Revitalisasi Pendidikan Pertanian serta Pengembangan Standardisasi dan Sertifikasi Profesi SDM Pertanian
	10.3	Kegiatan Pendidikan Menengah Pertanian
	10.4	Kegiatan Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian
	10.5	Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
11.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	
	11.1	Kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan
	11.2	Kegiatan Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Kerawanan Pangan
	11.3	Kegiatan Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan
	11.4	Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan
12.	Program Peningkatan Kualitas Perkarantinaaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati	

No.	Program/Kegiatan	
12.1		Kegiatan Peningkatan Kepatuhan, Kerjasama, dan Pengembangan Sistem Informasi Perkarantinaaan
12.2		Kegiatan Peningkatan Sistem Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani
12.3		Kegiatan Peningkatan Sistem Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati
12.4		Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Badan Karantina Pertanian
12.5		Kegiatan Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Laboratorium Uji Standar dan Uji Terap Teknik dan Metoda Karantina Pertanian
12.6		Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati

3.2. Cara Melaksanakan Kegiatan

Kegiatan pembangunan pertanian 2015 diprioritaskan untuk mendanai kegiatan strategis Kementerian Pertanian sesuai yang tertuang dalam RKP 2015 yaitu swasembada padi, jagung, kedelai, tebu (gula) dan daging sapi. Sasaran kuantitatif produksi beberapa komoditas utama pada tahun 2015 adalah sebagai berikut:

- a. Sasaran produksi komoditas tanaman pangan tahun 2015 meliputi: padi sebesar 73,44 juta ton, jagung 20,90 juta ton, kedelai 1,42 juta ton, kacang tanah 0,8 juta ton, kacang hijau 0,35 juta ton, ubi kayu 26,6 juta ton, dan ubi jalar 2,65 juta ton;
- b. Sasaran produksi hortikultura tahun 2015, mencakup: cabai 1,27 juta ton, bawang merah 1,01 juta ton, kentang 1,29 juta ton, mangga 2,38 juta ton, pisang 6,43 juta ton, jeruk 1,55 juta ton, durian 0,89 juta ton, manggis 0,19 juta ton, rimpang 0,41 juta ton, dan anggrek 21,42 juta tangkai;
- c. Sasaran produksi komoditas perkebunan tahun 2015 meliputi: tebu 2,95 juta ton, kelapa sawit/CPO 29,65 juta ton, karet 3,32 juta ton, kelapa 3,84 juta ton, kopi 0,76 juta ton, kakao 0,89 juta ton, lada 0,09 juta ton, cengkeh 0,11 juta ton, jambu mete 0,13 juta ton, tembakau 0,28 juta juta ton, kapas 0,002 juta ton, teh 0,15 juta ton, pala 0,028 juta ton, dan nilam 0,003 juta ton;
- d. Sasaran produksi komoditas peternakan tahun 2015 meliputi: daging sapi 447,46 ribu ton karkas, kerbau 29,12 ribu ton, kambing 68,42 ribu ton, domba

43,07 ribu ton, babi 263,88 ribu ton, ayam buras 287,09 ribu ton, itik 35,32 ribu ton, telur 1,92 juta ton, dan susu 1,11 juta ton.

Untuk mencapai target kegiatan strategis Kementerian Pertanian pada tahun 2015, upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Swasembada padi, jagung dan kedelai

Pengembangan budidaya padi 350.000 Ha, pengembangan budidaya jagung 35.000 Ha, pengembangan budidaya kedelai 500.000 Ha, pemberdayaan penangkar benih tanaman pangan 220 kelompok, dukungan sarana pasca panen padi 839 unit, dukungan sarana pasca panen jagung 298 unit, dukungan sarana panen kedelai 230 unit, usaha pengolahan hasil tanaman pangan 242 unit, pengembangan jaringan irigasi 350.000 Ha, pengembangan optimasi lahan 200.000 Ha, perluasan sawah 40.000 Ha, pengembangan System of Rice Intensification (SRI) 100.000 Ha, konservasi air danantisipasi anomali iklim 2.971 unit, dan pemberdayaan kelembagaan 400 unit.

b. Swasembada gula

Pengembangan tebu 60.000 Ha, pembinaan usaha perkebunan berkelanjutan di 32 provinsi, pembinaan pasca panen tanaman perkebunan 256 kelompok, SL-PHT perkebunan 202 kelompok, penanganan gangguan OPT perkebunan 16.298 Ha, usaha pengolahan hasil perkebunan 192 unit, dan perluasan lahan non sawah 25.000 Ha.

c. Swasembada daging

Penyebaran pejantan sapi potong 1.800 ekor, pengembangbiakan sapi potong 260 kelompok, pengembangan usaha penggemukan sapi potong 99 kelompok, pengembangan integrasi ternak ruminansia 150 stek, penanaman dan pengembangan tanaman pakan ternak berkualitas 3 juta stek, pengembangan unit pengolah pakan ruminansia 25 kelompok, produksi semen beku 5.600 dosis, produksi bibit ternak 312.260 ekor, penguatan kelembagaan pembibitan sapi potong 12 kelompok, dan penguatan kelembagaan sapi/kerbau betina bunting 200 kelompok.

3.3. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindarkan kekosongan rencana pembangunan nasional, presiden yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk tahun pertama periode pemerintahan Presiden berikutnya. Mengacu pada Undang-Undang tersebut, maka Indikator Kinerja Utama Kementerian Pertanian tahun 2015 masih mengacu

pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2012 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Pertanian Tahun 2010-2014, maka IKU Kementerian Pertanian Tahun 2015 antara lain:

- a. Swasembada dan swasembada berkelanjutan:
 - 1) Jumlah produksi padi.
 - 2) Jumlah produksi jagung.
 - 3) Jumlah produksi kedelai.
 - 4) Jumlah produksi tebu.
 - 5) Jumlah produksi daging sapi.
- b. Persentase peningkatan surplus neraca perdagangan.
- c. Nilai Tukar Petani (NTP).
- d. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian.
- e. Penyerapan tenaga kerja sektor pertanian.
- f. Investasi sektor pertanian.

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan Kementerian Pertanian Tahun 2015 merupakan salah satu dokumen yang dipersyaratkan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dokumen ini merupakan salah satu komponen dari siklus akuntabilitas kinerja yang dimulai dari perencanaan strategis dan diakhiri dengan adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Rencana Kinerja Tahunan ini merupakan rencana yang disusun sebagai turunan dari rencana strategis yang berjangka waktu satu tahun. Rencana kinerja memberikan gambaran lebih mendetail mengenai sasaran dan strategi pencapaiannya. Dokumen ini memuat program-program dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun dalam rangka mencapai sasaran yang ditetapkan. Indikator-indikator kinerja dari kegiatan berupa *output* dan indikator program berupa *outcome* ditentukan dalam dokumen ini sehingga diharapkan kegiatan-kegiatan tersebut dapat diukur capaian kerjanya. Pada tahun 2015 Kementerian Pertanian melaksanakan 12 program pembangunan pertanian dan 80 kegiatan guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Kemampuan menyusun rencana kinerja dan sasaran yang jelas dengan besaran yang terukur, lokasi, waktu, kelompok sasaran, dan manfaat bagi kelompok sasaran diperlukan dalam perencanaan kegiatan pembangunan pertanian. Kehadiran sistem anggaran terpadu berbasis kinerja akan membuka peluang bagi daerah untuk bekerja lebih optimal dan mencerminkan komitmen yang kuat dalam pelaksanaan sistem penganggaran terpadu berbasis kinerja dan berkerangka jangka menengah.

Kunci keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan terletak pada kemampuan menciptakan sinergisme dan keterpaduan pelaksanaan pembangunan melalui pemantapan sistem dan metode perencanaan, peningkatan kualitas SDM, penataan kelembagaan, dan peningkatan koordinasi antar instansi terkait. Dengan demikian hal-hal yang terkait dengan aspek potensi, tantangan, dan hambatan dapat diselesaikan dengan baik.

-o0o-

FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN

Kementerian/Lembaga : Kementerian Pertanian

Tahun : 2015

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
1.	Tercapainya Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan	Swasembada Berkelanjutan 1. Produksi Padi 2. Produksi Jagung Swasembada Berkelanjutan 1. Produksi Kedelai 2. Produksi Gula 3. Produksi Daging Sapi	73,40 Jt Ton GKG 20,90 Juta Ton 1,42 Juta Ton 2,95 Juta Ton 0,44 Juta Ton
2.	Meningkatnya Nilai Tambah, Daya Saing dan Ekspor	1. Meningkatnya surplus neraca perdagangan 2. Meningkatnya nilai investasi pertanian a. PMDN b. PMA	US\$ 23,75 Juta Rp 10.023,1 Miliar US\$ 1.438,2 Juta
3.	Meningkatnya Kesejahteraan Petani	1. Pertumbuhan PDB Pertanian 2. Nilai Tukar Petani (NTP) 3. Pertumbuhan Tenaga Kerja Pertanian	3,41% 102 1,15%